



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR: 100.3.3.3/223/HK/410.020.3/2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
VERIFIKASI DAN PENDOKUMENTASIAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SERTA RANCANGAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan verifikasi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sistematis dan terarah, perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Verifikasi dan Pendokumentasian Rencana Kerja dan Anggaran serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, dokumen Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Verifikasi dan Pendokumentasian Rencana Kerja dan Anggaran serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur Verifikasi dan Pendokumentasian Rencana Kerja dan Anggaran serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini, terdiri dari:

- a. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh Perangkat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Standar Operasional Prosedur Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh Tim Teknis Verifikasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. Standar Operasional Prosedur Pendokumentasian Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh Perangkat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. Standar Operasional Prosedur Pendokumentasian Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh Tim Teknis Verifikasi dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. Standar Operasional Prosedur Verifikasi dan Pendokumentasian Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh Tim Teknis Verifikasi dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V; dan
- f. Standar Operasional Prosedur Pendokumentasian Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rancangan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh Perangkat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

0

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 24 Agustus 2026
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYAUQUL MUHIBBIN



NINA INDRAYANTI, S.H., M.H.
NIP. 198101302006042007

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR: 100.3.3.3/223/HK/410.020.3/2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VERIFIKASI
DAN PENDOKUMENTASIAN RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN SERTA RANCANGAN DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH



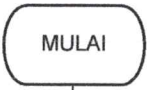
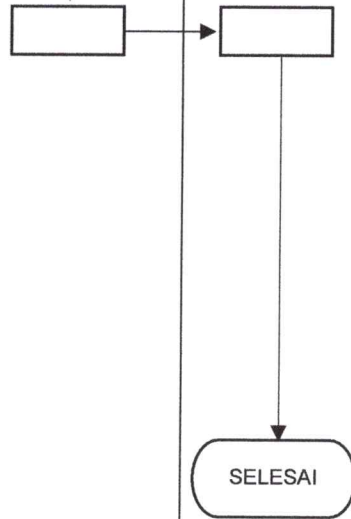
PEMERINTAH KOTA BLITAR
BADAN PENDAPATAN KEUANGAN ASET DAERAH
KOTA BLITAR

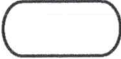
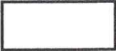
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN RKA-SKPD DAN PERUBAHAN RKA-SKPD
OLEH PERANGKAT DAERAH

BADAN PENDAPATAN KEUANGAN ASET DAERAH
KOTA BLITAR

Jalan Merdeka Nomor 105, Blitar, Kode Pos : 66117, Telp. (0342) 801919
<http://bpkad.blitarkota.go.id>, email : bpkad@blitarkota.go.id

PEMERINTAH KOTA BLITAR BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nomor SOP</td><td>: SOP/1010/BPKAD/2026</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 10 Juli 2026</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: -</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pengesahan</td><td>: 10 Juli 2026</td></tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td><td> Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar HERU EKO PRAMONO, S.STP, MM Pembina Utama Muda NIP. 197504091996021002 </td></tr> <tr> <td>Judul SOP</td><td>Standar Operasional dan Prosedur Penyusunan RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD oleh Perangkat Daerah</td></tr> </table>	Nomor SOP	: SOP/1010/BPKAD/2026	Tanggal Pembuatan	: 10 Juli 2026	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Pengesahan	: 10 Juli 2026	Disahkan Oleh	Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar HERU EKO PRAMONO, S.STP, MM Pembina Utama Muda NIP. 197504091996021002	Judul SOP	Standar Operasional dan Prosedur Penyusunan RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD oleh Perangkat Daerah
Nomor SOP	: SOP/1010/BPKAD/2026												
Tanggal Pembuatan	: 10 Juli 2026												
Tanggal Revisi	: -												
Tanggal Pengesahan	: 10 Juli 2026												
Disahkan Oleh	Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar HERU EKO PRAMONO, S.STP, MM Pembina Utama Muda NIP. 197504091996021002												
Judul SOP	Standar Operasional dan Prosedur Penyusunan RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD oleh Perangkat Daerah												
Dasar Hukum 1. Undang-Undang nomor 23 tahun 2024 tentang pemerintahan daerah 2. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah 3. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Keputusan Walikota Blitar Nomor: 100.3.3.3/183/HK/410.020.3/2026 tentang Tim Teknis Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 7. Petunjuk Teknis Verifikasi RKA-SKPD dan Rancangan DPA-SKPD oleh Tim Verifikasi pada Pemerintah Kota Blitar	Kualifikasi Pelaksana 1. Memiliki pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi sesuai bidang tugas dalam perangkat daerah 2. Memiliki pemahaman sistem penganggaran dan penyusunan RKA-SKPD 3. Memiliki pemahaman aplikasi SIPD RI penganggaran 4. Memahami peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah 5. Mengetahui alat bantu verifikasi RKA-SKPD <i>website</i> KAWENTAR												
Keterkaitan 1. SOP Verifikasi RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD oleh Tim Teknis Verifikasi 2. SOP Pendokumentasian RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD oleh Perangkat Daerah 3. SOP Pendokumentasian RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD oleh Tim Teknis Verifikasi dan PPKD 4. SOP verifikasi dan pendokumentasian Rancangan DPA-SKPD/ Perubahan DPA-SKPD oleh Tim Teknis Verifikasi dan PPKD 5. SOP Pendokumentasian Rancangan DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD oleh Perangkat Daerah	Peralatan Perlengkapan 1. Laptop/Personal Komputer 2. SIPD RI (kesesuaian jadwal tergantung pada kualitas jaringan/akses aplikasi SIPD RI) 3. <i>Website</i> "KAWENTAR" https://sites.google.com/view/kawentar												
Peringatan Keterlambatan atau kesalahan dalam proses verifikasi dapat mengakibatkan tertundanya proses penyusunan APBD dan Penetapan DPA-SKPD	Pencatatan dan Pendataan SIPD RI, <i>website</i> "KAWENTAR"												

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Perangkat Daerah	TAPD	Kelengkapan	Waktu hari	Output	
1	Menyusun RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD melalui SIPD-RI sesuai ketentuan			Surat Edaran penyusunan RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD	Maks 2 hari	RKA-SKPD / Perubahan RKA-SKPD pada SIPD RI telah sesuai dengan pagu KUA-PPAS / Perubahan KUA-PPAS	RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD disusun sesuai dengan program, kegiatan, subkegiatan pada Renja PD/Perubahan Renja PD, serta pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam KUA dan PPAS/Perubahan KUA dan PPAS dengan memedomani Surat Edaran Penyusunan RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD
2	Menyampaikan RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD ke TAPD untuk dilakukan verifikasi melalui <i>website</i> "KAWENTAR" (unduh RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD di SIPD RI dan unggah di <i>website</i> "KAWENTAR")			RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD pada SIPD RI telah sesuai dengan pagu KUA-PPAS/Perubahan KUA-PPAS	Maks 1 hari	RKA-SKPD / Perubahan RKA-SKPD telah diunggah di <i>website</i> "KAWENTAR" beserta dokumen kelengkapan verifikasi	RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD dan kelengkapan diunggah ke <i>website</i> "KAWENTAR" pada site "BERANDA", dengan cara: - Cara pertama: mengunggah file RKA-SKPD pada menu "UPLOAD DOKUMEN" dan pilih nama Unit/Sub unit Perangkat Daerah. - Cara kedua: mengunggah file RKA-SKPD pada menu "UPLOAD DOKUMEN" tekan tombol "UPLOAD" atau tombol "QR CODE RKA". Dengan begitu akan terhubung dengan google drive dan pilih nama Perangkat Daerah. Dokumen kelengkapan verifikasi sebagaimana pada SE penyusunan RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD serta Juknis Verifikasi RKA-SKPD dan Rancangan DPA-SKPD oleh Tim Verifikasi pada Pemerintah Kota Blitar

Simbol	Keterangan
	Mulai dan selesai
	Pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada
	Proses
	Arah proses kegiatan
	Penyambung proses dalam lembar/halaman yang berbeda

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA INDRAYANTI, S.H., M.H.
NIP. 198101302006042007

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR: 100.3.3.3/223/HK/410.020.3/2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VERIFIKASI
DAN PENDOKUMENTASIAN RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN SERTA RANCANGAN DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH



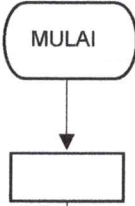
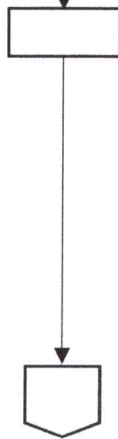
PEMERINTAH KOTA BLITAR
BADAN PENDAPATAN KEUANGAN ASET DAERAH
KOTA BLITAR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
VERIFIKASI RKA-SKPD DAN PERUBAHAN RKA-SKPD OLEH TIM TEKNIS
VERIFIKASI

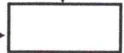
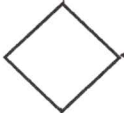
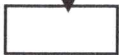
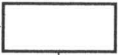
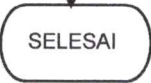
BADAN PENDAPATAN KEUANGAN ASET DAERAH
KOTA BLITAR

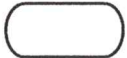
Jalan Merdeka Nomor 105, Blitar, Kode Pos : 66117, Telp. (0342) 801919
<http://bpkad.blitarkota.go.id>, email : bpkad@blitarkota.go.id

 PEMERINTAH KOTA BLITAR BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Nomor SOP	: SOP/1010/BPKAD/2026
	Tanggal Pembuatan	: 10 Juli 2026
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Pengesahan	: 10 Juli 2026
	Disahkan Oleh	 Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar HERU EKO PRAMONO, S.STP, MM Pembina Utama Muda NIP. 197504091996021002
	Judul SOP	Verifikasi RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD oleh Tim Teknis Verifikasi
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang nomor 23 tahun 2024 tentang pemerintahan daerah 2. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah 3. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Keputusan Walikota Blitar Nomor: 100.3.3.3/183/HK/410.020.3/2026 tentang Tim Teknis Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 7. Petunjuk Teknis Verifikasi RKA-SKPD dan Rancangan DPA-SKPD oleh Tim Verifikasi pada Pemerintah Kota Blitar		1. Memiliki pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi sesuai bidang tugas dalam perangkat daerah 2. Memiliki pemahaman sistem penganggaran dan penyusunan RKA-SKPD 3. Memiliki pemahaman aplikasi SIPD RI penganggaran 4. Memahami peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah 5. Mengetahui alat bantu verifikasi RKA-SKPD <i>website</i> KAWENTAR
Keterkaitan		Peralatan Perlengkapan
1. SOP Penyusunan RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD oleh Perangkat Daerah 2. SOP Pendokumentasian RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD oleh Perangkat Daerah 3. SOP Pendokumentasian RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD oleh Tim Teknis Verifikasi dan PPKD 4. SOP verifikasi dan pendokumentasian Rancangan DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD oleh Tim Teknis Verifikasi dan PPKD 5. SOP Pendokumentasian Rancangan DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD oleh Perangkat Daerah		1. Laptop/Personal Komputer 2. SIPD RI (kesesuaian jadwal tergantung pada kualitas jaringan/akses aplikasi SIPD RI) 3. <i>Website</i> "KAWENTAR" https://sites.google.com/view/kawentar
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Keterlambatan atau kesalahan dalam proses verifikasi dapat mengakibatkan tertundanya proses penyusunan APBD dan Penetapan DPA-SKPD		SIPD RI, <i>website</i> "KAWENTAR"

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Tim Teknis Verifikasi	TAPD	Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu hari	Output	
1	Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen verifikasi yang telah diunggah oleh perangkat daerah di <i>website</i> "KAWENTAR" sesuai ketentuan.				SE Penyusunan RKA - SKPD/Perubahan RKA-SKPD dan Juknis verifikasi RKA-SKPD dan Rancangan DPA-SKPD oleh tim verifikasi.	Maks 1 hari	Dokumen verifikasi lengkap tersedia di <i>website</i> "KAWENTAR"	Pemeriksaan meliputi kesesuaian format RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD dan konsistensi data yang tercantum dalam dokumen RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD, kesesuaian tahapan, serta kelengkapan dokumen pendukung, antara lain: - Renja-PD/Perubahan Renja-PD tahun x - RKBMD (Pengadaan dan Pemeliharaan) tahun tahun x ; - RAB/DED Pengadaan Konstruksi; - Data Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Perangkat Daerah Pengelola PAD; - Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM bagi Perangkat Daerah yang menanganai SPM; dan - Dokumen PPRG (GAP, GBS dan KAK); RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD beserta kelengkapannya diakses pada Beranda – pilih menu menu "UPLOAD DOKUMEN" dan pilih tombol nama Unit/Sub unit Perangkat Daerah atau tekan tombol "UPLOAD"/QR CODE RKA".
2	Menelaah substansi dokumen RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dituangkan di kertas kerja pada <i>website</i> "KAWENTAR".				Dokumen verifikasi lengkap tersedia di <i>website</i> "KAWENTAR"	Maks 2 hari	Kertas Kerja hasil verifikasi RKA-SKPD /Perubahan RKA-SKPD	Kertas kerja verifikasi elektronik pada <i>website</i> "KAWENTAR" untuk mengoptimalkan tugas tim teknis. Kertas kerja meliputi: - Kertas kerja verifikasi unsur perencanaan. - Kertas kerja verifikasi unsur keuangan daerah (keuangan,aset, dan pendapatan). - Kertas kerja verifikasi unsur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). - Kertas kerja verifikasi unsur pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). - Kertas Kerja verifikasi unsur Anggaran Responsif Gender (ARG).

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Tim Teknis Verifikasi	TAPD	Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu hari	Output	
								f. Kertas kerja verifikasi unsur belanja pegawai. g. Kertas kerja verifikasi unsur pembentukan produk hukum, dan h. Kertas Kerja tambahan (Pengujian atas Kesesuaian Alokasi Belanja Mengikat, Belanja Earmark dan Rekening Belanja serta kewajaran rincian belanja). Kertas kerja verifikasi dapat diakses di site Tim Verifikasi/Asistensi. Format Kertas Kerja sebagaimana terlampir.
3	Melakukan klarifikasi apabila terdapat ketidaksesuaian atau hal yang perlu dibahas dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh penjelasan dan untuk penyempurnaan dokumen RKA-SKPD.	YA SELESAI	TIDAK		Kertas Kerja hasil verifikasi RKA-SKPD /Perubahan RKA-SKPD	Maks 1 hari	Hasil desk verifikasi RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD	Pengisian Kertas Kerja Verifikasi/Asistensi Unsur Keuangan Daerah sesuai dengan Juknis Verifikasi RKA-SKPD dan Rancangan DPA-SKPD oleh Tim Verifikasi pada Pemerintah Kota Blitar. Point-point pengisian kertas kerja antara lain: - Mengisi Email yang telah ditentukan pada Juknis atau bisa menggunakan Email verifikator pribadi - Pilih nama unit/sub unit perangkat daerah - Pilih program dan kegiatan - Setelah itu isikan poin-point verifikasi sesuai substansi verifikasi dari unsur/bidang tugas masing-masing pada format kertas kerja. - Untuk melihat kesesuaian pagu program dan kegiatan dapat diakses link Pagu KUA – PPAS/Perubahan KUA-PPAS Tahun 202x yang tertera pada bagian atas kertas kerja - Mengisi nama verifikator dan koordinator tim teknis verifikasi - Setelah semua terisi selanjutnya tekan tombol submit

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Tim Teknis Verifikasi	TAPD	Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu hari	Output	
								Apabila ada perbaikan isian kertas kerja maka tekan tombol back. Untuk membuat kertas kerja baru tekan tombol clear form Kertas kerja secara otomatis tersimpan di google drive yang terhubung dengan <i>website</i> KAWENTAR Bila tim teknis akan mengakses kertas kerja karena ada perbaikan, maka tekan tombol download hasil verifikasi/asistensi pilih warna merah, dan dipilih folder tim sesuai pembagian bidang tugas
4	Memperbaiki RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD pada SIPD RI sesuai dengan catatan hasil desk verifikasi RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD				Hasil desk verifikasi RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD	Maks 2 hari	RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD pada SIPD RI telah diperbaiki	
5	Meneliti hasil perbaikan RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD pada SIPD RI dan memberi informasi ke OPD bila hasil perbaikan sudah sesuai atau belum sesuai				RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD pada SIPD RI telah diperbaiki	Maks 1 hari	RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD pada SIPD RI telah sesuai dengan catatan tim teknis verifikasi	
6	Melaporkan hasil verifikasi RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD ke TAPD				RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD pada SIPD RI telah sesuai dengan catatan tim teknis verifikasi	Maks 1 hari	Laporan hasil verifikasi RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD	
								

Simbol	Keterangan
	Mulai dan selesai
	Pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada
	Proses
	Arah proses kegiatan
	Penyambung proses dalam lembar/halaman yang berbeda

1. Kertas kerja verifikasi unsur perencanaan



**KERTAS KERJA VERIFIKASI/ASISTENSI RKA SKPD
PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN ANGGARAN 202X**

1

Nama SKPD : <<Nama SKPD>>
PROGRAM : <<PROGRAM>>
KEGIATAN : <<KEGIATAN>>
PAGU :

NO	UNSUR PENYUSUNAN RKA SKPD	JAWABAN	Catatan Hasil Verifikasi
1	UNSUR PERENCANAAN		
	1. Rasionalitas dan kesesuaian capaian kinerja dengan dokumen perencanaan	<<Rasionalitas dan kesesuaian capaian kinerja dengan dokumen perencanaan>>	<<Catatan Rasionalitas dan kesesuaian capaian kinerja dengan dokumen perencanaan>>
	2. Kesesuaian indikator kinerja dengan dokumen perencanaan	<<Kesesuaian indikator kinerja dengan dokumen perencanaan>>	<<Catatan Kesesuaian indikator kinerja dengan dokumen perencanaan>>
	3. Kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan dokumen perencanaan sebelumnya.	<<Kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan dokumen perencanaan sebelumnya.>>	<<Catatan Kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan dokumen perencanaan sebelumnya.>>
	4. Kesesuaian dokumen perencanaan lainnya (Masterplan/FS/DED/atau sejenisnya).	<<Kesesuaian dokumen perencanaan lainnya (Masterplan/FS/D ED/atau sejenisnya).>>	<<Catatan Kesesuaian dokumen perencanaan lainnya (Masterplan/FS/DED/atau sejenisnya).>>

Dokumen telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber Sandi Negara (BSSN)

5. Kesesuaian penganggaran Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan usulan masyarakat dengan nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan	<<Kesesuaian penganggaran Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan usulan masyarakat dengan nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan>>	<<Catatan Kesesuaian penganggaran Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan usulan masyarakat dengan nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan>>
TIM BAPPERINDA : <<TIM BAPPERINDA>>		
KOORDINATOR : <<KOORDINATOR>> 		

Dokumen telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber Sandi Negara (BSSN)

(Handwritten signature)

2. Kertas kerja verifikasi unsur keuangan daerah (keuangan,aset, dan pendapatan)

2



**KERTAS KERJA VERIFIKASI/ASISTENSI RKA SKPD
PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN ANGGARAN 202X**

Nama SKPD : <<Nama SKPD>>

PROGRAM : <<PROGRAM>>

KEGIATAN : <<KEGIATAN>>

PAGU :

NO	UNSUR PENYUSUNAN RKA SKPD	JAWABAN	Catatan Hasil Verifikasi
2	UNSUR KEUANGAN DAERAH		
1.	Kesesuaian penggunaan SSH, SBU, dan HSPK	<<Kesesuaian penggunaan SSH, SBU, dan HSPK>>	<<Catatan Kesesuaian penggunaan SSH, SBU, dan HSPK>>
2.	Kelengkapan Formulir PRKA dengan RKBMD dan Perubahannya	<<Kelengkapan Formulir PRKA dengan RKBMD dan Perubahannya>>	<<Catatan Kelengkapan Formulir PRKA dengan RKBMD dan Perubahannya>>
3.	Kepatuhan terhadap P3DN/TKDN	<<Kepatuhan terhadap P3DN/TKDN>>	<<Catatan Kepatuhan terhadap P3DN/TKDN>>
4.	Kelengkapan laporan penggunaan BMD sementara, laporan penggunaan BMD dioperasikan pihak lain, laporan pemanfaatan BMD, dan laporan pakta integritas BMD	<<Kelengkapan laporan penggunaan BMD sementara, laporan penggunaan BMD dioperasikan pihak lain, laporan pemanfaatan BMD, dan laporan pakta integritas BMD>>	<<Catatan Kelengkapan laporan penggunaan BMD sementara, laporan penggunaan BMD dioperasikan pihak lain, laporan pemanfaatan BMD, dan laporan pakta integritas BMD>>
		TIM BPKAD ASET : <<TIM BPKAD ASET>>	

Dokumen telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE). Badan Siber Sandi Negara (BSSN)

KOORDINATOR : <<KOORDINATOR>>



KAWENTAR

Dokumen telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE). Badan Siber Sandi Negara (BSSN)



KERTAS KERJA VERIFIKASI/ASISTENSI RKA SKPD
PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN ANGGARAN 202X

2

Nama SKPD : <<Nama SKPD>>
PROGRAM : <<PROGRAM>>
KEGIATAN : <<KEGIATAN>>
PAGU :

NO	UNSUR PENYUSUNAN RKA SKPD	JAWABAN	Catatan Hasil Verifikasi
2	UNSUR KEUANGAN DAERAH		
	1. Kesesuaian pagu belanja dengan PPAS yang sudah ditetapkan	<<Kesesuaian pagu belanja dengan PPAS yang sudah ditetapkan>>	<<Catatan Kesesuaian pagu belanja dengan PPAS yang sudah ditetapkan>>
	2. Kesesuaian pembebanan rekening uraian belanja	<<Kesesuaian pembebanan rekening uraian belanja>>	<<Catatan Kesesuaian pembebanan rekening uraian belanja>>
	3. Kesesuaian penggunaan ASB	<<Kesesuaian penggunaan ASB>>	<<Catatan Kesesuaian penggunaan ASB>>
	4. Kewajaran volume belanja yang direncanakan	<<Kewajaran volume belanja yang direncanakan>>	<<Catatan Kewajaran volume belanja yang direncanakan>>
	TIM BPKAD ANGGARAN : <<TIM BPKAD ANGGARAN>>		
KOORDINATOR : <<KOORDINATOR>>			
			

Dokumen telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber Sandi Negara (BSSN)

0



KERTAS KERJA VERIFIKASI/ASISTENSI RKA SKPD
PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN ANGGARAN 202X

2

Nama SKPD : <<Nama SKPD>>

TARGET PENDAPATAN :

NO	UNSUR PENYUSUNAN RKA SKPD	JAWABAN	Catatan Hasil Verifikasi
2	UNSUR KEUANGAN DAERAH		
	1. Kesesuaian Potensi PAD dengan Tarif Perda Nomor 8 Tahun 2023 dan Keputusan Walikota	<<Kesesuaian Potensi PAD dengan Tarif Perda Nomor 8 Tahun 2023 dan Keputusan Walikota>>	<<Catatan Kesesuaian Potensi PAD dengan Tarif Perda Nomor 8 Tahun 2023 dan Keputusan Walikota>>
	2. Kesesuaian jenis obyek pajak/retribusi dengan ketentuan	<<Kesesuaian jenis obyek pajak/retribusi dengan ketentuan>>	<<Catatan Kesesuaian jenis obyek pajak/retribusi dengan ketentuan>>
	3. Kewajaran dan kelengkapan proyeksi target PAD	<<Kewajaran dan kelengkapan proyeksi target PAD>>	<<Catatan Kewajaran dan kelengkapan proyeksi target PAD>>
		TIM BPKAD : <<TIM BPKAD>>	

KOORDINATOR : ROBY PRASETYO, S.Sos.



Dokumen telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber Sandi Negara (BSSN)

0

3. Kertas kerja verifikasi unsur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

3



**KERTAS KERJA VERIFIKASI/ASISTENSI RKA SKPD
PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN ANGGARAN 202X**

Nama SKPD : <<Nama SKPD>>

PAGU :

NO	UNSUR PENYUSUNAN RKA SKPD	JAWABAN	Catatan Hasil Verifikasi
4	UNSUR - UNSUR VERIFIKASI TEKNIS TERKAIT TIK		
	1. Keselarasan dengan rencana induk maupun Arsitektur SPBE	<<Keselarasan dengan rencana induk maupun Arsitektur SPBE>>	<<Catatan Keselarasan dengan rencana induk maupun Arsitektur SPBE>>
	2. Mendukung Kebutuhan integrasi dengan sistem elektronik lain	<<Mendukung Kebutuhan integrasi dengan sistem elektronik lain>>	<<Catatan Mendukung Kebutuhan integrasi dengan sistem elektronik lain>>
	3. Mendukung implementasi program Smart City	<<Mendukung implementasi program Smart City>>	<<Catatan Mendukung implementasi program Smart City>>
	4. Memenuhi standar teknis dan kebijakan TIK	<<Memenuhi standar teknis dan kebijakan TIK>>	<<Catatan Memenuhi standar teknis dan kebijakan TIK>>
	5. Dapat Berbagi pakai data maupun sumbernya	<<Dapat Berbagi pakai data maupun sumbernya>>	<<Catatan Dapat Berbagi pakai data maupun sumbernya>>
	6. Kesesuaian dengan kebutuhan dan adaptasi kemajuan teknologi	<<Kesesuaian dengan kebutuhan dan adaptasi kemajuan teknologi>>	<<Catatan Kesesuaian dengan kebutuhan dan adaptasi kemajuan teknologi>>
	TIM DISKOMINFOTIK : <<TIM DISKOMINFOTIK>>		

Dokumen telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber Sandi Negara (BSSN)



KAWENTAR

Dokumen telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber Sandi Negara (BSSN)

4. Kertas kerja verifikasi unsur pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)



4

KERTAS KERJA VERIFIKASI/ASISTENSI RKA SKPD
PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN ANGGARAN 202X

Nama SKPD : <<Nama SKPD>>

PAGU :

NO	UNSUR PENYUSUNAN RKA SKPD	JAWABAN	Catatan Hasil Verifikasi
3	UNSUR PEMENUHAN SPM		
	Pemenuhan Anggaran terkait Pelayanan SPM	<<Pemenuhan Anggaran terkait Pelayanan SPM>>	<<Catatan Hasil Verifikasi>>
		TIM BAGIAN PEMERINTAHAN : <<TIM BAGIAN PEMERINTAHAN>>	



Dokumen telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber Sandi Negara (BSSN)

2

5. Kertas Kerja verifikasi unsur Anggaran Responsif Gender (ARG)



KERTAS KERJA VERIFIKASI/ASISTENSI RKA SKPD

PEMERINTAH KOTA BLITAR

TAHUN ANGGARAN 202X

5

Nama SKPD : <<Nama SKPD>>

PAGU :

NO	UNSUR PENYUSUNAN RKA SKPD	JAWABAN	Catatan Hasil Verifikasi
5	ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)		
	1. Kelengkapan dokumen ARG GAP, GBS, KAK/TOR, dan rincian RKA tersedia untuk sub kegiatan/aktivitas yang diverifikasi.	<<Kelengkapan dokumen ARG GAP, GBS, KAK/TOR, dan rincian RKA tersedia untuk sub kegiatan/aktivitas yang diverifikasi.>>	<<Catatan Kelengkapan dokumen ARG>>
	2. Data dan isu/kesenjangan gender Data terpilah/data gender relevan, bersumber jelas, dan menunjukkan isu/kesenjangan gender secara spesifik.	<<Data dan isu/kesenjangan gender Data terpilah/data gender relevan, bersumber jelas, dan menunjukkan isu/kesenjangan gender secara spesifik.>>	<<Catatan Data dan isu/kesenjangan gender>>

Dokumen telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber Sandi Negara (BSSN)

3. Analisis penyebab kesenjangan Penyebab kesenjangan tergambar, termasuk aspek akses, partisipasi, kontrol, manfaat, dan/atau faktor internal-eksternal.	<<Analisis penyebab kesenjangan Penyebab kesenjangan tergambar, termasuk aspek akses, partisipasi, kontrol, manfaat, dan/atau faktor internal-eksternal.>>	<<Catatan Analisis penyebab kesenjangan>>
4. Keterkaitan GAP dengan GBS Hasil analisis GAP menjadi dasar GBS, termasuk tujuan, rencana aksi, output/outcome, dan indikator gender.	<<Keterkaitan GAP dengan GBS Hasil analisis GAP menjadi dasar GBS, termasuk tujuan, rencana aksi, output/outcome, dan indikator gender.>>	<<Catatan Keterkaitan GAP dengan GBS>>
5. Integrasi substansi gender dalam KAK/TOR Latar belakang, tujuan, sasaran, metode, tahapan, dan keluaran KAK/TOR merespons isu gender.	<<Integrasi substansi gender dalam KAK/TOR Latar belakang, tujuan, sasaran, metode, tahapan, dan keluaran KAK/TOR merespons isu gender.>>	<<Catatan Integrasi substansi gender dalam KAK/TOR>>

Dokumen telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber Sandi Negara (BSSN)

6. Konsistensi GBS - KAK/TOR - RKA Nama sub kegiatan, output, target, volume, satuan, lokasi, sasaran, dan pagu saling sesuai.	<<Konsistensi GBS - KAK/TOR - RKA Nama sub kegiatan, output, target, volume, satuan, lokasi, sasaran, dan pagu saling sesuai.>>	<<Catatan Konsistensi GBS - KAK/TOR - RKA>>
7. Sasaran dan indikator kinerja responsif gender Sasaran penerima manfaat jelas; output/outcome terukur dan menunjukkan manfaat bagi laki-laki/perempuan secara adil.	<<Sasaran dan indikator kinerja responsif gender Sasaran penerima manfaat jelas; output/outcome terukur dan menunjukkan manfaat bagi laki-laki/perempuan secara adil.>>	<<Catatan Sasaran dan indikator kinerja responsif gender>>
8. Kesesuaian komponen belanja Rincian belanja mendukung rencana aksi gender, rasional terhadap target.	<<Kesesuaian komponen belanja Rincian belanja mendukung rencana aksi gender, rasional terhadap target.>>	<<Catatan Kesesuaian komponen belanja>>
TIM DP3AP2KB : <<TIM DP3AP2KB>>		

Dokumen telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber Sandi Negara (BSSN)

KOORDINATOR : <<KOORDINATOR>>



Dokumen telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber Sandi Negara (BSSN)

6. Kertas kerja verifikasi unsur belanja pegawai



KERTAS KERJA VERIFIKASI/ASISTENSI RKA SKPD

PEMERINTAH KOTA BLITAR

TAHUN ANGGARAN 202X

6

Nama SKPD : <<Nama SKPD>>

PAGU :

NO	UNSUR PENYUSUNAN RKA SKPD	JAWABAN	Catatan Hasil Verifikasi
6	UNSUR BELANJA PEGAWAI		
	1. Kebutuhan belanja, gaji, tunjangan, pajak jaminan kesehatan, JKK, JKM, dll	<<Kebutuhan belanja, gaji, tunjangan, pajak jaminan kesehatan, JKK, JKM, dll>>	<<Catatan Kebutuhan belanja, gaji, tunjangan, pajak jaminan kesehatan, JKK, JKM, dll>>
	2. Kebutuhan Pemenuhan Anggaran Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan ketentuan	<<Kebutuhan Pemenuhan Anggaran Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan ketentuan>>	<<Catatan Kebutuhan Pemenuhan Anggaran Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan ketentuan>>
		TIM BKPSDM : <<TIM BKPSDM>>	



Dokumen telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber Sandi Negara (BSSN)



7. Kertas kerja verifikasi unsur pembentukan produk hukum



7

KERTAS KERJA VERIFIKASI/ASISTENSI RKA SKPD
PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN ANGGARAN 202X

Nama SKPD : <<Nama SKPD>>

PAGU :

NO	UNSUR PENYUSUNAN RKA SKPD	JAWABAN	Catatan Hasil Verifikasi
7	UNSUR PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM		
	Pembentukan produk hukum daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau penunjang kegiatan	<<Pembentukan produk hukum daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau penunjang kegiatan>>	<<Catatan Hasil Verifikasi>>
		TIM BAGIAN HUKUM : <<TIM BAGIAN HUKUM>>	

KOORDINATOR : <<KOORDINATOR>>



Dokumen telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber Sandi Negara (BSSN)

WALIKOTA BLITAR,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.



SYAUQUL MUHHIBBIN

NINA INDRAYANTI, S.H., M.H.
NIP. 198101302006042007

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR: 100.3.3.3/223/HK/410.020.3/2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VERIFIKASI
DAN PENDOKUMENTASIAN RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN SERTA RANCANGAN DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH



PEMERINTAH KOTA BLITAR
BADAN PENDAPATAN KEUANGAN ASET DAERAH
KOTA BLITAR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENDOKUMENTASIAN RKA-SKPD OLEH PERANGKAT DAERAH

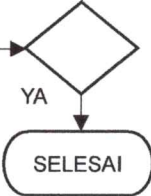
BADAN PENDAPATAN KEUANGAN ASET DAERAH
KOTA BLITAR

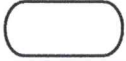
Jalan Merdeka Nomor 105, Blitar, Kode Pos : 66117, Telp. (0342) 801919
<http://bpkad.blitarkota.go.id>, email : bpkad@blitarkota.go.id

0

PEMERINTAH KOTA BLITAR BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	<table> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>: SOP/1010/BPKAD/2026</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 10 Juli 2026</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: -</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pengesahan</td><td>: 10 Juli 2026</td></tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td><td> Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar HERU EKO PRAMONO, S.STP, MM Pembina Utama Muda NIP. 197504091996021002 </td></tr> <tr> <td>Judul SOP</td><td>Pendokumentasian RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD oleh Perangkat Daerah</td></tr> </table>	Nomor SOP	: SOP/1010/BPKAD/2026	Tanggal Pembuatan	: 10 Juli 2026	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Pengesahan	: 10 Juli 2026	Disahkan Oleh	Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar HERU EKO PRAMONO, S.STP, MM Pembina Utama Muda NIP. 197504091996021002	Judul SOP	Pendokumentasian RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD oleh Perangkat Daerah
Nomor SOP	: SOP/1010/BPKAD/2026												
Tanggal Pembuatan	: 10 Juli 2026												
Tanggal Revisi	: -												
Tanggal Pengesahan	: 10 Juli 2026												
Disahkan Oleh	Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar HERU EKO PRAMONO, S.STP, MM Pembina Utama Muda NIP. 197504091996021002												
Judul SOP	Pendokumentasian RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD oleh Perangkat Daerah												
Dasar Hukum 1. Undang-Undang nomor 23 tahun 2024 tentang pemerintahan daerah 2. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah 3. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Keputusan Walikota Blitar Nomor: 100.3.3.3/183/HK/410.020.3/2026 tentang Tim Teknis Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 7. Petunjuk Teknis Verifikasi RKA-SKPD dan Rancangan DPA-SKPD oleh Tim Verifikasi pada Pemerintah Kota Blitar	Kualifikasi Pelaksana 1. Memiliki pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi sesuai bidang tugas dalam perangkat daerah 2. Memiliki pemahaman sistem penganggaran dan penyusunan RKA-SKPD 3. Memiliki pemahaman aplikasi SIPD RI penganggaran 4. Memahami peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah 5. Mengetahui alat bantu verifikasi RKA-SKPD <i>website</i> KAWENTAR												
Keterkaitan 1. SOP Penyusunan RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD oleh Perangkat Daerah 2. SOP Verifikasi RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD oleh Tim Teknis Verifikasi 3. SOP Pendokumentasian RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD oleh Tim Teknis Verifikasi dan PPKD 4. SOP verifikasi dan pendokumentasian Rancangan DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD oleh Tim Teknis dan PPKD 5. SOP Pendokumentasian Rancangan DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD oleh Perangkat Daerah	Peralatan Perlengkapan 1. Laptop/Personal Komputer 4. SIPD RI (kesesuaian jadwal tergantung pada kualitas jaringan/akses aplikasi SIPD RI) 2. <i>Website</i> "KAWENTAR" https://sites.google.com/view/kawentar 3. Aplikasi BeSign atau aplikasi sejenis yang mendukung invisible QR CODE												
Peringatan Keterlambatan atau kesalahan dalam proses verifikasi dapat mengakibatkan tertundanya proses penyusunan APBD dan Penetapan DPA-SKPD	Pencatatan dan Pendataan SIPD RI, <i>website</i> "KAWENTAR"												

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Perangkat Daerah	Kepala Perangkat Daerah	Bidang Anggaran / PPKD	Kelengkapan	Waktu hari	Output	
1	Mengunduh dokumen RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD yang telah diperbaiki dan disesuaikan berdasarkan desk hasil verifikasi, pada SIPD RI, dan mengunduh kertas kerja Tim teknis verifikasi pada <i>website</i> "KAWENTAR"	<pre> graph TD MULA([MULA]) --> B1[] B1 --> B2[] B2 --> B3[] B3 --> B4[] </pre>			Surat Pendokumentasian RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD	Maks 1 hari	Dokumen RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD yang telah selesai diverifikasi dan diperbaiki sesuai catatan, serta kertas kerja verifikasi tim teknis verifikasi	a. Kertas kerja verifikasi dapat diakses melalui <i>website</i> "KAWENTAR" pada site "TIM VERIFIKASI/ASISTENSI", tekan tombol warna merah di bawah tulisan "DOWNLOAD HASIL VERIFIKASI/ASISTENSI" yang secara otomatis terhubung dengan folder google drive, dan pilih folder sesuai Unsur Verifikasi (Tim Teknis). b. File kertas kerja tim teknis verifikasi dinamai sesuai unit/sub unit perangkat daerah masing-masing c. Perangkat daerah tidak diperkenankan untuk merubah catatan dalam kertas kerja d. Format nama file, RKA_Nama Perangkat Daerah_TAHUN misalnya RKA_BPKAD_2026
2	Menggabung dokumen RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD sesuai dengan urutan kegiatan dan menempatkan kertas kerja pada urutan sebelum RKA-SKPD per kegiatan				Dokumen RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD yang telah selesai diverifikasi dan diperbaiki sesuai catatan, serta kertas kerja verifikasi tim teknis verifikasi	Maks 1 hari	Dokumen RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD yang sudah digabung dengan kertas kerja dalam bentuk pdf	
4	Mengunduh QR CODE pada <i>website</i> "KAWENTAR" dan memasang QR CODE pada dokumen RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan.				Dokumen RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD yang sudah digabung dengan kertas kerja dalam bentuk pdf	Maks 1 hari	Dokumen RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD telah dilengkapi QR CODE	QR CODE diunduh di site "BERANDA" pada menu "UPLOAD DOKUMEN" dan pilih nama unit/sub unit perangkat daerah atau tekan tombol "UPLOAD"/QR CODE RKA". Kertas kerja tim teknis verifikasi telah dilengkapi dengan QR CODE Perbedaan: QR CODE untuk OPD tujuannya ke folder RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD masing-masing OPD, sedangkan QR CODE tim teknis tujuannya ke folder kertas kerja tim verifikasi

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Perangkat Daerah	Kepala Perangkat Daerah	Bidang Anggaran / PPKD	Kelengkapan	Waktu hari	Output	
5	Memberikan otorisasi pada dokumen RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan				Dokumen RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD telah dilengkapi QR CODE	Maks 1 hari	Dokumen RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD telah diotorisasi oleh Kepala PD/PA	Otorisasi menggunakan aplikasi BeSign atau aplikasi sejenis yang mendukung invisible QR CODE
6	Menyampaikan RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD ke PPKD/Bidang Anggaran melalui website "KAWENTAR"				Dokumen RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD telah diotorisasi oleh Kepala PD/PA	Maks 1 hari	Dokumen RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD telah diupload di website KAWENTAR	Pada site "BERANDA" dengan tekan tombol "UPLOAD TTE" dan dipilih sesuai unit/sub unit perangkat daerah masing-masing.
7	Meneliti kelengkapan dokumen RKA-SKPD sesuai ketentuan				Dokumen RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD telah diupload di website KAWENTAR	Maks 2 hari	Dokumen RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD telah terdokumentasi di website KAWENTAR	Pada tahapan ini tim verifikasi dan koordinator melakukan otorisasi dokumen RKA-SKPD. Tahapan dan waktu pelaksanaan mengikuti SOP pendokumentasian RKA-SKPD oleh Tim Verifikasi dan PPKD

Simbol	Keterangan
	Mulai dan selesai
	Pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada
	Proses
	Arah proses kegiatan
	Penyambung proses dalam lembar/halaman yang berbeda

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA INDRAYANTI, S.H., M.H.
NIP. 198101302006042007

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR: 100.3.3.3/223/HK/410.020.3/2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VERIFIKASI
DAN PENDOKUMENTASIAN RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN SERTA RANCANGAN DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH



PEMERINTAH KOTA BLITAR
BADAN PENDAPATAN KEUANGAN ASET DAERAH
KOTA BLITAR

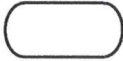
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENDOKUMENTASIAN RKA-SKPD DAN PERUBAHAN RKA-SKPD OLEH TIM
TEKNIS VERIFIKASI DAN PPKD

BADAN PENDAPATAN KEUANGAN ASET DAERAH
KOTA BLITAR

Jalan Merdeka Nomor 105, Blitar, Kode Pos : 66117, Telp. (0342) 801919
<http://bpkad.blitarkota.go.id>, email : bpkad@blitarkota.go.id

PEMERINTAH KOTA BLITAR BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nomor SOP</td><td>: SOP/1010/BPKAD/2026</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 10 Juli 2026</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: -</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pengesahan</td><td>: 10 Juli 2026</td></tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td><td> Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar  HERU EKO PRAMONO, S.STP, MM Pembina Utama Muda NIP. 197504091996021002 </td></tr> <tr> <td>Judul SOP</td><td>Pendokumentasian RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD oleh Tim Teknis Verifikasi dan PPKD</td></tr> </table>	Nomor SOP	: SOP/1010/BPKAD/2026	Tanggal Pembuatan	: 10 Juli 2026	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Pengesahan	: 10 Juli 2026	Disahkan Oleh	Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar  HERU EKO PRAMONO, S.STP, MM Pembina Utama Muda NIP. 197504091996021002	Judul SOP	Pendokumentasian RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD oleh Tim Teknis Verifikasi dan PPKD
Nomor SOP	: SOP/1010/BPKAD/2026												
Tanggal Pembuatan	: 10 Juli 2026												
Tanggal Revisi	: -												
Tanggal Pengesahan	: 10 Juli 2026												
Disahkan Oleh	Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar  HERU EKO PRAMONO, S.STP, MM Pembina Utama Muda NIP. 197504091996021002												
Judul SOP	Pendokumentasian RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD oleh Tim Teknis Verifikasi dan PPKD												
Dasar Hukum 1. Undang-Undang nomor 23 tahun 2024 tentang pemerintahan daerah 2. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah 3. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Keputusan Walikota Blitar Nomor: 100.3.3.3/183/HK/410.020.3/2026 tentang Tim Teknis Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 7. Petunjuk Teknis Verifikasi RKA-SKPD dan Rancangan DPA-SKPD oleh Tim Verifikasi pada Pemerintah Kota Blitar	Kualifikasi Pelaksana 1. Memiliki pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi sesuai bidang tugas dalam perangkat daerah 2. Memiliki pemahaman sistem penganggaran dan penyusunan RKA-SKPD 3. Memiliki pemahaman aplikasi SIPD RI penganggaran 4. Memahami peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah 5. Mengetahui alat bantu verifikasi RKA-SKPD <i>website</i> KAWENTAR												
Keterkaitan 1. SOP Verifikasi RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD oleh Perangkat Daerah 2. SOP Verifikasi RKA-SKPD oleh Tim Teknis Verifikasi 3. SOP Pendokumentasian RKA-SKPD oleh Perangkat Daerah 4. SOP verifikasi dan pendokumentasian Rancangan DPA-SKPD oleh Tim Teknis dan PPKD 5. SOP Pendokumentasian Rancangan DPA-SKPD oleh Perangkat Daerah	Peralatan Perlengkapan 1. Laptop/Personal Komputer 2. <i>Website</i> "KAWENTAR" https://sites.google.com/view/kawentar 3. Aplikasi BeSign atau aplikasi sejenis yang mendukung invisible QR CODE												
Peringatan Keterlambatan atau kesalahan dalam proses verifikasi dapat mengakibatkan tertundanya proses penyusunan APBD dan Penetapan DPA-SKPD	Pencatatan dan Pendataan SIPD RI, <i>website</i> "KAWENTAR" Dokumen fisik RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD												

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPKD/ Bidang Anggaran	Perangkat daerah	Tim Verifikasi	Koordinat or Tim Teknis	Kelengkapan	Waktu hari	Output	
1	Mengunduh dokumen RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD untuk diotorisasi tim teknis verifikasi dan koordinator verifikasi	MULAI				RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD yang telah diotorisasi Kepala PD di <i>website</i> "KAWENTAR"	Maks 1 hari	File RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD diakses pada <i>website</i> "KAWENTAR" site "BERANDA" dengan tekan tombol "UPLOAD TTE" dan dipilih sesuai unit/sub unit perangkat daerah yang dituju
3	Pemberian otorisasi oleh Tim Teknis Verifikasi dan koordinator tim teknis verifikasi					File RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD	Maks 1 hari	File RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD telah diotorisasi tim teknis verifikasi dan koordinator tim teknis verifikasi	Otorasi dilakukan melalui aplikasi <i>Besign</i> atau aplikasi sejenis yang mendukung <i>invisible</i> QR Code
4	Mengunggah dokumen RKA-SKPD yang sudah diotorisasi pada <i>website</i> "KAWENTAR"	SELESAI				File RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD telah diotorisasi tim teknis verifikasi dan koordinator tim teknis verifikasi	Maks 1 hari	RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD telah terdokumentasi di <i>website</i> KAWENTAR	Dokumen RKA-SKPD diunggah di <i>website</i> "KAWENTAR" site "BERANDA" dengan tekan tombol "UPLOAD TTE" dan dipilih sesuai unit/sub unit perangkat daerah yang dituju
5	Menyampaikan dokumen fisik RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD ke perangkat daerah					RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD telah terdokumentasi di <i>website</i> KAWENTAR	-	Dokumen RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD fisik terdistribusi ke seluruh perangkat daerah	Penyampaian dokumen fisik RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD menyesuaikan waktu cetak dokumen

Simbol	Keterangan
	Mulai dan selesai
	Pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada
	Proses
	Arah proses kegiatan
	Penyambung proses dalam lembar/halaman yang berbeda

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA INDRAYANTI, S.H., M.H.
NIP. 198101302006042007

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHHIBBIN

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR: 100.3.3.3/223/HK/410.020.3/2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VERIFIKASI
DAN PENDOKUMENTASIAN RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN SERTA RANCANGAN DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH



PEMERINTAH KOTA BLITAR
BADAN PENDAPATAN KEUANGAN ASET DAERAH
KOTA BLITAR

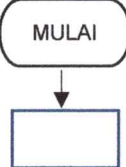
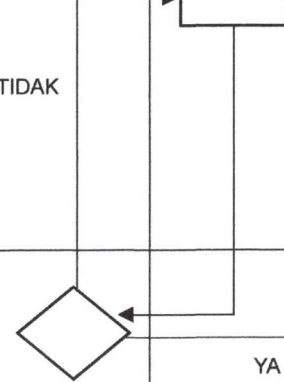
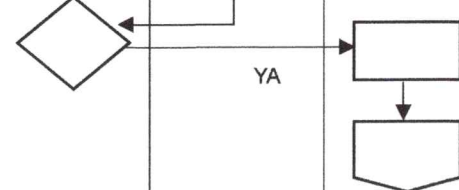
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
VERIFIKASI DAN PENDOKUMENTASIAN RANCANGAN DPA-SKPD DAN
RANCANGAN PERUBAHAN DPA-SKPD OLEH TIM TEKNIS VERIFIKASI
DAN PPKD

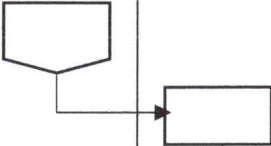
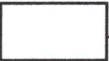
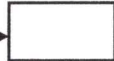
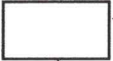
BADAN PENDAPATAN KEUANGAN ASET DAERAH
KOTA BLITAR

Jalan Merdeka Nomor 105, Blitar, Kode Pos : 66117, Telp. (0342) 801919
<http://bpkad.blitarkota.go.id>, email : bpkad@blitarkota.go.id

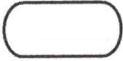
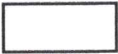
02

PEMERINTAH KOTA BLITAR BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>: SOP/1010/BPKAD/2026</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 10 Juli 2026</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: -</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pengesahan</td><td>: 10 Juli 2026</td></tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td><td> Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar  HERU EKO PRAMONO, S.STP, MM Pembina Utama Muda NIP. 197504091996021002 </td></tr> <tr> <td>Judul SOP</td><td>Pendokumentasian Rancangan DPA-SKPD dan Rancangan Perubahan DPA-SKPD oleh Tim Teknis Verifikasi dan PPKD</td></tr> </table>	Nomor SOP	: SOP/1010/BPKAD/2026	Tanggal Pembuatan	: 10 Juli 2026	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Pengesahan	: 10 Juli 2026	Disahkan Oleh	Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar  HERU EKO PRAMONO, S.STP, MM Pembina Utama Muda NIP. 197504091996021002	Judul SOP	Pendokumentasian Rancangan DPA-SKPD dan Rancangan Perubahan DPA-SKPD oleh Tim Teknis Verifikasi dan PPKD
Nomor SOP	: SOP/1010/BPKAD/2026												
Tanggal Pembuatan	: 10 Juli 2026												
Tanggal Revisi	: -												
Tanggal Pengesahan	: 10 Juli 2026												
Disahkan Oleh	Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar  HERU EKO PRAMONO, S.STP, MM Pembina Utama Muda NIP. 197504091996021002												
Judul SOP	Pendokumentasian Rancangan DPA-SKPD dan Rancangan Perubahan DPA-SKPD oleh Tim Teknis Verifikasi dan PPKD												
Dasar Hukum 1. Undang-Undang nomor 23 tahun 2024 tentang pemerintahan daerah 2. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah 3. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Keputusan Walikota Blitar Nomor: 100.3.3.3/183/HK/410.020.3/2026 tentang Tim Teknis Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 7. Petunjuk Teknis Verifikasi RKA-SKPD dan Rancangan DPA-SKPD oleh Tim Verifikasi pada Pemerintah Kota Blitar	Kualifikasi Pelaksana 1. Memiliki pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi sesuai bidang tugas dalam perangkat daerah 2. Memiliki pemahaman sistem penganggaran dan penyusunan RKA-SKPD 3. Memiliki pemahaman aplikasi SIPD RI penganggaran 4. Memahami peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah 5. Mengetahui alat bantu verifikasi RKA-SKPD <i>website</i> KAWENTAR												
Keterkaitan 1. SOP Verifikasi RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD oleh Perangkat Daerah 2. SOP Verifikasi RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD oleh Tim Teknis Verifikasi 3. SOP Pendokumentasian RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD oleh Perangkat Daerah 4. SOP verifikasi dan pendokumentasian Rancangan DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD oleh Tim Teknis dan PPKD 5. SOP Pendokumentasian Rancangan DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD oleh Perangkat Daerah	Peralatan Perlengkapan 1. Laptop/Personal Komputer 2. SIPD RI modul Penatausahaan (kesesuaian jadwal tergantung pada kualitas jaringan/akses aplikasi SIPD RI) 3. <i>Website</i> "KAWENTAR" 4. Aplikasi BeSign atau aplikasi sejenis yang mendukung invisible QR CODE												
Peringatan Keterlambatan atau kesalahan dalam proses verifikasi dapat mengakibatkan tertundanya proses penyusunan APBD dan Penetapan DPA-SKPD	Pencatatan dan Pendataan SIPD RI, <i>website</i> "KAWENTAR" Dokumen fisik DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD												

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		PPKD	Kepala Perangkat Daerah	TAPD	Tim Verifikasi	Sekretaris Daerah	Kelengkapan	Waktu Hari	Output	
1.	Membuat surat pemberitahuan penyampaian Rancangan DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD						Perda APBD/Perubahan APBD dan Penjabaran APBD/Perubahan Penjabaran APBD	Maks 2 hari	Surat Pemberitahuan	Memuat: • Batas waktu penyampaian DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD • Kelengkapan Dokumen rancangan DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD • Format dokumen rancangan DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD Maksimal 3 hari kerja setelah APBD/Perubahan APBD ditetapkan
2.	Menyampaikan surat pemberitahuan ke Perangkat Daerah, sekaligus mengkoordinasikan penyusunan Rencana Anggaran Kas (RAK)						Surat Pemberitahuan	Maks 1 hari	1. Rencana Anggaran Kas (RAK) 2. Rancangan DPA-SKPD pada SIPD-RI Modul Penatausahaan	
3.	Menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD sesuai ketentuan						1. Rencana Anggaran Kas (RAK)\ 2. Rancangan DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD pada SIPD-RI Modul Penatausahaan	Maks 6 hari	Rancangan DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD lengkap dan telah diotorisasi oleh Kepala PD/PA dan telah di unggah di web KAWENTAR	Mengikuti tahapan SOP Pendokumentasian Rancangan DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD oleh Perangkat Daerah
4.	Meneliti kelengkapan rancangan DPA-SKPD dan menyerahkan ke TAPD untuk diverifikasi						Rancangan DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD lengkap dan telah diotorisasi oleh Kepala PD/PA dan telah di unggah di web KAWENTAR	Maks 1 hari	Rancangan DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD lengkap sesuai ketentuan	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		PPKD	Kepala Perangkat Daerah	TAPD	Tim Verifikasi	Sekretaris Daerah	Kelengkapan	Waktu Hari	Output	
5.	TAPD melalui tim verifikasi melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD sesuai ketentuan						Rancangan DPA SKPD lengkap sesuai ketentuan	Maks 5 hari	Rancangan DPA-SKPD terverifikasi	Berdasarkan Perda APBD/Perubahan Perda APBD dan Perwal Penjabaran APBD/Perubahan Penjabaran APBD yang telah ditetapkan Apabila terdapat ketidaksesuaian rekening belanja atau hal lainnya yang menyebabkan anggaran tidak bisa dilaksanakan, maka perubahannya melalui mekanisme pergeseran APBD atau Perubahan APBD.
6.	Memberikan otorisasi rancangan DPA-SKPD setelah dilakukan verifikasi						Rancangan DPA-SKPD terverifikasi	Maks 1	Rancangan DPA-SKPD yang telah diotorisasi TAPD	TAPD meliputi: Bapperinda sebagai wakil ketua TAPD, BPKAD sebagai Sekretaris TAPD, Bagian Hukum sebagai anggota
7.	Memberikan persetujuan atas rancangan DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD						Rancangan DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD yang telah diotorisasi TAPD	Maks 1 hari	Rancangan DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD telah disetujui oleh Sekretaris Daerah	
8.	Mengesahkan DPA-SKPD atas rancangan DPA-SKPD	 					Rancangan DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD telah disetujui oleh Sekretaris Daerah	Maks 1 hari	Dokumen DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		PPKD	Kepala Perangkat Daerah	TAPD	Tim Verifikasi	Sekretaris Daerah	Kelengkapan	Waktu Hari	Output	
9.	Menyampaikan DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD ke perangkat daerah melalui <i>website</i> "KAWENTAR"	<pre> graph TD A[/] --> B[] B --> C[] C --> D([SELESAI]) </pre>	<pre> graph LR A[] --> B[] B --> C([SELESAI]) </pre>				Dokumen DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD	Maks 1 hari	DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD terdokumentasi pada <i>website</i> "KAWENTAR"	Penyampaian DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD melalui <i>website</i> "KAWENTAR" site "TIM VERIFIKASI/ASISTENSI" dengan mengakses menu "DOWNLOAD HASIL VERIFIKASI/ASISTENSI" pilih tombol warna biru dan pilih nama Perangkat Daerah masing-masing
10	Menyampaikan dokumen fisik DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD ke perangkat daerah	<pre> graph LR A[] --> B[] B --> C([SELESAI]) </pre>	<pre> graph LR A[] --> B[] B --> C([SELESAI]) </pre>				DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD terdokumentasi pada <i>website</i> "KAWENTAR"	-	Dokumen DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD fisik terdistribusi ke seluruh perangkat daerah	Penyampaian dokumen fisik DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD menyesuaikan waktu cetak dokumen

Simbol	Keterangan
	Mulai dan selesai
	Pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada
	Proses
	Arah proses kegiatan
	Penyambung proses dalam lembar/halaman yang berbeda

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA INDRAYANTI, S.H., M.H.
NIP. 198101302006042007

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHHIBBIN

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR: 100.3.3.3/223/HK/410.020.3/2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VERIFIKASI
DAN PENDOKUMENTASIAN RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN SERTA RANCANGAN DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH



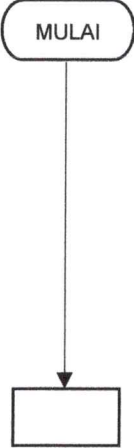
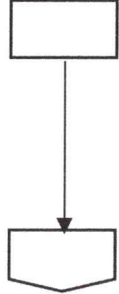
PEMERINTAH KOTA BLITAR
BADAN PENDAPATAN KEUANGAN ASET DAERAH
KOTA BLITAR

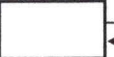
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENDOKUMENTASIAN RANCANGAN DPA-SKPD DAN RANCANGAN
PERUBAHAN DPA-SKPD OLEH PERANGKAT DAERAH

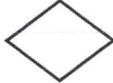
BADAN PENDAPATAN KEUANGAN ASET DAERAH
KOTA BLITAR

Jalan Merdeka Nomor 105, Blitar, Kode Pos : 66117, Telp. (0342) 801919
<http://bpkad.blitarkota.go.id>, email : bpkad@blitarkota.go.id

PEMERINTAH KOTA BLITAR BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nomor SOP</td><td>: SOP/1010/BPKAD/2026</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 10 Juli 2026</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: -</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pengesahan</td><td>: 10 Juli 2026</td></tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td><td> Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar  HERU EKO PRAMONO, S.STP, MM Pembina Utama Muda NIP. 197504091996021002 </td></tr> <tr> <td>Judul SOP</td><td>Pendokumentasian Rancangan DPA-SKPD dan Perubahan Rancangan DPA-SKPD oleh Perangkat Daerah</td></tr> </table>	Nomor SOP	: SOP/1010/BPKAD/2026	Tanggal Pembuatan	: 10 Juli 2026	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Pengesahan	: 10 Juli 2026	Disahkan Oleh	Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar  HERU EKO PRAMONO, S.STP, MM Pembina Utama Muda NIP. 197504091996021002	Judul SOP	Pendokumentasian Rancangan DPA-SKPD dan Perubahan Rancangan DPA-SKPD oleh Perangkat Daerah
Nomor SOP	: SOP/1010/BPKAD/2026												
Tanggal Pembuatan	: 10 Juli 2026												
Tanggal Revisi	: -												
Tanggal Pengesahan	: 10 Juli 2026												
Disahkan Oleh	Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar  HERU EKO PRAMONO, S.STP, MM Pembina Utama Muda NIP. 197504091996021002												
Judul SOP	Pendokumentasian Rancangan DPA-SKPD dan Perubahan Rancangan DPA-SKPD oleh Perangkat Daerah												
Dasar Hukum 1. Undang-Undang nomor 23 tahun 2024 tentang pemerintahan daerah 2. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah 3. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Keputusan Walikota Blitar Nomor: 100.3.3.3/183/HK/410.020.3/2026 tentang Tim Teknis Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 7. Petunjuk Teknis Verifikasi RKA-SKPD dan Rancangan DPA-SKPD oleh Tim Verifikasi pada Pemerintah Kota Blitar	Kualifikasi Pelaksana 1. Memiliki pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi sesuai bidang tugas dalam perangkat daerah 2. Memiliki pemahaman sistem penganggaran dan penyusunan RKA-SKPD 3. Memiliki pemahaman aplikasi SIPD RI penganggaran 4. Memahami peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah 5. Mengetahui alat bantu verifikasi RKA-SKPD <i>website</i> KAWENTAR												
Keterkaitan 1. SOP Verifikasi RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD oleh Perangkat Daerah 2. SOP Verifikasi RKA-SKPD/Perubahan oleh Tim Teknis Verifikasi 3. SOP Pendokumentasian RKA-SKPD oleh Perangkat Daerah 4. SOP verifikasi dan pendokumentasian Rancangan DPA-SKPD oleh Tim Teknis dan PPKD 5. SOP Pendokumentasian Rancangan DPA-SKPD oleh Tim Teknis Verifikasi dan PPKD	Peralatan Perlengkapan 1. Laptop/Personal Komputer 2. SIPD RI modul Penatausahaan (kesesuaian jadwal tergantung pada kualitas jaringan/akses aplikasi SIPD RI) 3. <i>Website</i> "KAWENTAR" 4. Aplikasi BeSign atau aplikasi sejenis yang mendukung invisible QR CODE												
Peringatan Keterlambatan atau kesalahan dalam proses verifikasi dapat mengakibatkan tertundanya proses penyusunan APBD dan Penetapan DPA-SKPD	Pencatatan dan Pendataan SIPD RI, <i>website</i> "KAWENTAR"												

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Perangkat Daerah	Kepala Perangkat Daerah	PPKD	Kelengkapan	Waktu Hari	Output	
1.	Mengunduh dan menggabung rancangan DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD di SIPD-RI model penatausahaan, kelengkapan dan format sesuai ketentuan.				Surat Pemberitahuan Penyampaian DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD	Maks 2 hari	Rancangan DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD	Kelengkapan meliputi: - Halaman Persetujuan - Halaman DPA SKPD - Rekap DPA-SKPD - DPA Pendapatan (bagi SKPD pengelola pendapatan) - DPA Belanja - DPA Rincian Belanja - DPA Pembiayaan (PPKD) Format: - File dalam bentuk (.pdf) - Nama, misal : DPA_BPKAD_2027/DPPA_BPKAD-2026 - Font : Arial 11 - Jarak Frame : 5 - Jarak Kolom: 2 - Jarak Tulisan : 1,3 - Tanggal : diisi tanggal pengesahan - Ketentuan Footer BSrE: Arial 9 – center "Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)"
2.	Mengunduh QR CODE yang tersedia pada website KAWENTAR dan dipasang ditempat yang telah ditentukan.				Rancangan DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD	Maks 1 hari	Rancangan DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD yang telah terpasang QR Code	QR Code dapat diunduh di site "BERANDA" pada "UPLOAD DOKUMEN" klik tombol "QR CODE DPA" selanjutnya unduh sesuai dengan nama perangkat daerah masing-masing. QR Code tersebut dipasang pada kolom pengesahan yang telah ditentukan : - Halaman persetujuan yang memuat kolom sekretaris dan PPKD - Halaman DPA-SKPD memuat kolom PPKD dan PA

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Perangkat Daerah	Kepala Perangkat Daerah	PPKD	Kelengkapan	Waktu Hari	Output	
								c. Rekap DPA-SKPD memuat kolom Ka SKPD, PPKD dan TAPD d. DPA-Rincian Belanja SKPD memuat kolom Ka SKPD, PPKD dan TAPD Ketentuan QR CODE: • 1 (satu) QR CODE untuk semua kolom pengesahan • Ukuran QR Code diupayakan ukurannya sama di setiap kolom pengesahan, dan • untuk kolom TAPD cukup 1 QR CODE
3.	Melakukan otorisasi atas rancangan DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD				Rancangan DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD yang telah terpasang QR CODE	Maks 1 hari	Rancangan DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD yang telah diotorisasi oleh Ka OPD/PA	Otorasi dilakukan melalui aplikasi <i>Besign</i> atau aplikasi sejenis yang mendukung <i>invisible</i> QR Code
4.	Menyampaikan rancangan DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD ke PPKD dengan mengunggah file rancangan DPA-SKPD yang telah diotorisasi Ka OPD/PA ke <i>website</i> "KAWENTAR"			 TIDAK YA SELESAI	Rancangan DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD yang telah diotorisasi oleh Ka OPD/PA	Maks 1 hari	Rancangan DPA-SKPD yang telah diotorisasi Ka PD/PA tersedia <i>website</i> "KAWENTAR"	Dokumen diunggah pada <i>website</i> "KAWENTAR" di <i>site</i> "BERANDA" pada "UPLOAD DOKUMEN" dan pilih nama Perangkat Daerah.

Simbol	Keterangan
	Mulai dan selesai
	Pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada
	Proses
	Arah proses kegiatan
	Penyambung proses dalam lembar/halaman yang berbeda

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA INDRAYANTI, S.H., M.H.
NIP. 198101302006042007

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHHIBBIN